



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

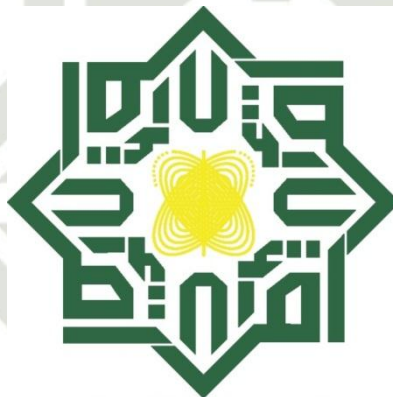
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

WIEDZIAN TY SEPTIANA WULANDARI

NIM. 11720424952

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

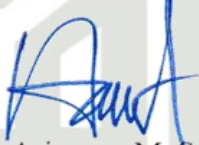
Skripsi dengan judul **Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh :

Nama : Wiedzianty Septiana Wulandari
NIM : 11720424952
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Arisman, M. Sy

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh :

Nama : Wiedzianty Septiana Wulandari
 NIM : 11720424952
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Dr. M. Alpi syahrin, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Yang mana hal itu merupakan suatu persoalan karena sejatinya KPK merupakan lembaga independen yang sistem kepegawaiannya diurus secara mandiri dengan peraturan komisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak bagi sistem kerja pegawai karena pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN ini. Dan bagaimana perspektif fiqh siyasah menanggapi hal ini. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Dan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini ialah prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN ini diatur secara lengkap dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. Dan pengalihan status pegawai ini memberi dampak kepada sistem kerja pegawai. Semula pegawai KPK memiliki karakter independen, setelah beralih status pegawai ASN menjadi dependen dan terikat kepada peraturan kepegawaian ASN yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Penelitian dalam kajian fiqh siyasah, KPK memiliki kesamaan dengan *Wilayah al-mazalim* yakni lembaga yang memiliki kewenangan khusus pada zaman Dinasti Abbasiyah seperti memberantas kecurangan yang dilakukan pegawai atau pejabat negara yang ditugaskan untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan sebagaimana mestinya. Perubahan UU dan pengalihan status kepegawaian pegawai KPK diharapkan akan menjadikan KPK lebih kuat dan profesional, bukan terbatas dan melemah.

Kata kunci: Pengalihan Pegawai, ASN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Muhamma saw. yang mana berkat perjuangan beliau Islam menyebar ke segala penjuru dunia, hingga ajaran-ajarannya memberikan ketentraman dan kedamaian bagi umatnya di mana pun berada.

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Dalam penulisan ini penulis menemukan banyak kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Hartosusilo, S.Pd.I dan ibunda Wahyuning Windarwati, S.Pd.i tercinta, adinda terkasih Dzikri Ihza Maulana Al Hafiz, Razkiah Azmi Qalbi Syafaati, seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan, do’a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II H. Kusnadi, M.Pd, dan Wakil Rektor III Dr. Promadi, MA., Ph.D serta seluruh civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Hajar, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, S. Ag., M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Arisman, M. Sy selaku pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rahman Alwi, M. Ag selaku penasehat akademik yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Diri sendiri yang telah mau dan mampu berusaha menjalani dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS B angkatan 2017 yang telah banyak memberi pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama belajar di perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat ku Syelladita Rofitasari, Namira FetyZahra, Lusiana Putri, Raudotul Hikmah Mufli, Faridahtul Hasanah, dan Utary Noer Utami yang selalu mendukung dan memberi motivasi ketika penulis mengalami masalah. Semoga persahabatan kita tetap terjaga.

11. Untuk semua keluarga, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah swt yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri dan kepada manusia penulis memohon maaf dan semoga apa yang kita lakukan mendapat keidhoan dari Allah swt. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Pekanbaru, 30 Mei 2021

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

WIEDZIAN TY SEPTIANA WULANDARI
NIM. 11720424952

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020	14
A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	14
B. Dasar Hukum Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi	25
C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	28
D. Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi	35
E. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020	39
F. Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020	40
BAB III KONSEP TEORI	40
A. Islam dan Negara	40
B. <i>Wuzarah</i> (Kementrian)	50

C. Urgensi Lembaga dalam Negara	52
D. Korupsi dalam Pandangan Islam	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Prosedur Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara	58
B. Dampak Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Sistem Kerja Pegawai	63
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

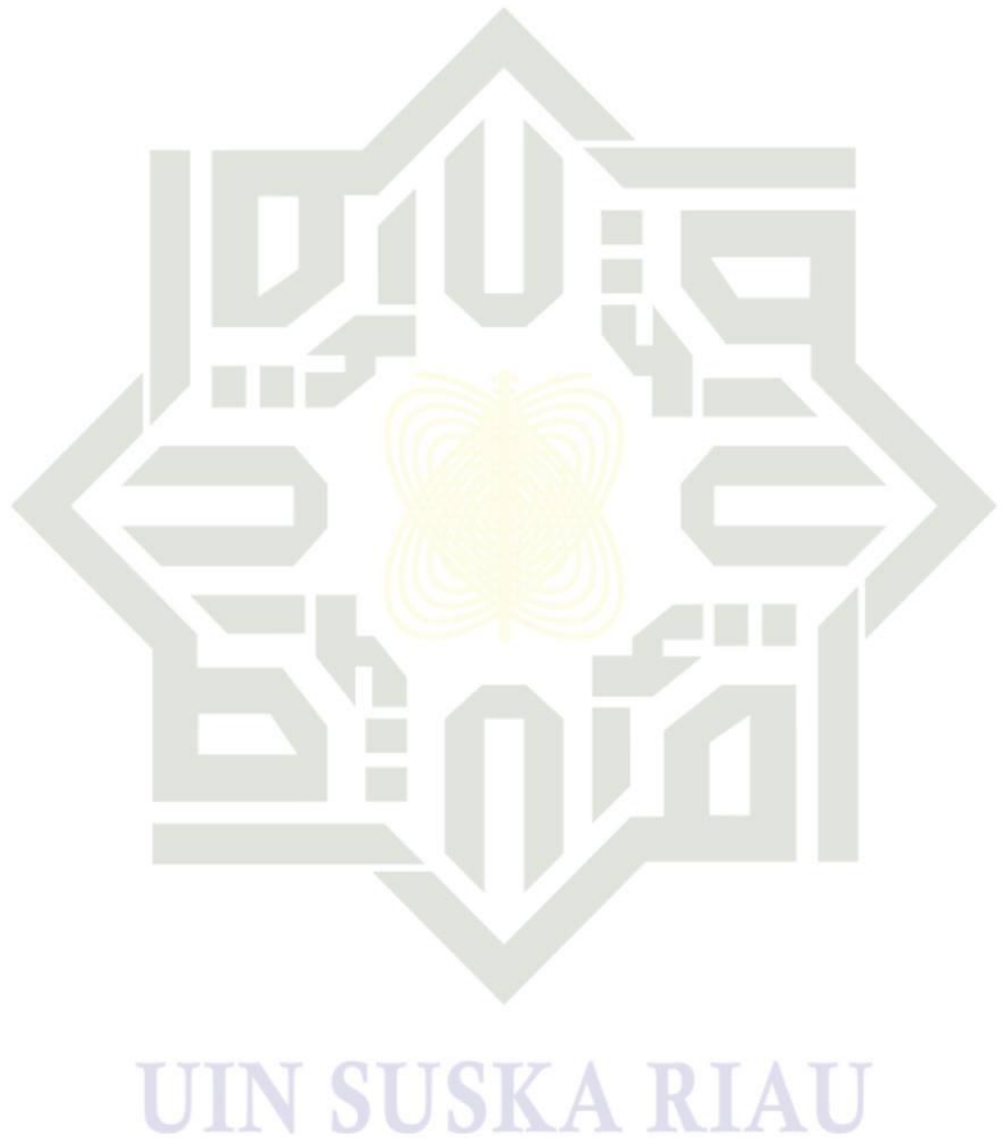
Tabel IV.1	Pegawai Tetap dalam Jabatan Struktural (JPT dan Administrator) ASN	61
Tabel IV.2	Penempatan Pegawai Tetap Jabatan Spesialis dalam Jabatan Fungsional Keahlian ASN	61
Tabel IV.3	Penempatan Pegawai Tetap Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional Keterampilan ASN	62
Tabel IV.4	Penempatan Pegawai Tidak Tetap Dalam Jabatan Pelaksana ASN	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi	38
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dinamis, ajarannya mampu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dalam hal bernegara khususnya, hingga saat ini Islam dapat memberi gambaran dan arahan tentang sistem bernegara. Hal ini tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah saw, *ijtihad* para sahabat, *tabi' tabi'in* dan juga para ulama. Tak hanya membahas tentang kepemimpinan dari suatu negara, Islam juga memiliki sistem tentang lembaga-lembaga negara.

Membahas negara maka tak lepas dengan politik, politik Islam atau bisa juga disebut hukum tata negara dalam Islam hal itu merupakan ranah Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan bersifat intern atau ekstern suatu negara.¹

Korupsi adalah salah satu permasalahan negara, suatu praktek yang tidak asing dan secara sadar atau tidak terjadi di sekitar kita. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Menurut jenisnya, tindak pidana yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah : *Ghulul* (Penggelapan), *Risywah* (Penyuapan), *Ghasab* (Mengambil paksa hak/harta

¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana), hal.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang lain), Khianat, *Sariqah* (Pencurian), *Hirabah* (Perampokan), *Al-Maks* (Pungutan Liar), *Al-Ikhtilas* (Pencopetan), *Al-Ihtihab* (Perampasan).²

Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut *Al-Ghulul*, yakni adanya pengkhianatan seseorang atau pejabat yang dipercaya untuk memegang suatu jabatan tertentu di suatu negara. Kemudian jabatan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kolega sehingga akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian.³ Dasar hukumnya yakni bersumber pada al- qur'an surah Ali Imran ayat 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : *Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.*⁴

Sudah barang tentu bahwa korupsi merupakan hal yang dapat merugikan dan merusak tatanan bernegara. Tak hanya Islam, agama selain Islam juga mengatur tentang larangan korupsi. Permasalahan korupsi juga dialami negara-negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dinyatakan "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*).” Negara hukum dapat dilihat dari dua pengertian yakni negara

² Nur Rahmat, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*, (Relasi Inti Media: Yogyakarta, 2015), hal.10

³ Enang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi*, (PT. Remaja Rosda Karya : Bandung, 2016), hal.4

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. Kalim : Banten, hal. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum dalam arti formal (*rechtmatigeheid*) artinya bahwa hukum diterapkan melalui dasar hukum yang jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan negara hukum dalam arti materil (*doelmatigeheid*) yang artinya hukum diterapkan berdasarkan manfaat.⁵

Sebagai organisasi besar yang memiliki tujuan bersama, negara membutuhkan alat pelengkap untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan membentuk lembaga-lembaga negara. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang Dasar, juga ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan berdasarkan Keputusan Presiden. Di tingkat pusat, dapat dibedakan dalam empat tingkat kelembagaan, yaitu :⁶

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

⁵ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Penerbit Andi:Yogyakarta),

⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sinar Grafika:Jakarta), hal. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan dirinci lagi dalam Undang-Undang.

Lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-Undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas Hak Asasi Manusia dan sebagainya.⁷

Lembaga dalam tingkatan ketiga ialah lembaga yang sumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* Presiden (*presidential policy*). Dan tingkatan terakhir ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif Menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung

⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

jawabnya, dapat saja dibentuk dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang bersifat spesifik dan tidak permanen.

Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik yang menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat negara serta pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara. Maka, pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Perubahan-perubahan yang signifikan dalam perkembangan tersebut, antara lain ketentuan Hukum Pembuktian yang semula berdasarkan pada prinsip "*negative wettelijke beginsel*" diubah menjadi pembuktian terbalik dan

⁸ Romli Atmasasmita, dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi : Fakta dan Analisis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terbatas (*limited reversal of burden of proof*), penguatan lembaga pemberantasan korupsi dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Amanat pembentukan KPK dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dan dibentuk pada tahun 2003. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengurangi bahkan menumpas habis praktik-praktik yang dapat merugikan negara dan warga negara. KPK juga diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik merugikan tersebut demi tercapainya penyelenggaraan negara yang stabil.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki visi yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Asas-asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas⁹.

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Sebenarnya pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara

⁹ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, (Saka Mitra Kompetensi : Klaten, 2010) hal.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

nasional untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Dalam strategi pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih”.¹⁰

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020.¹¹

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara ini akan menimbulkan pemikiran mengenai sifat independen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.¹²

¹⁰ Achmad Bajuri, “Jurnal Bisnis dan Ekonomi”, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2011, hal.88

¹¹ [https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/read/2020/08/09/161438465/pegawai-kpk-kini-resmi-berstatus-asn-pp-sudah-ditandatangani-jokowi,diakses pada 11/09/2020 pukul 12.00 WIB](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/read/2020/08/09/161438465/pegawai-kpk-kini-resmi-berstatus-asn-pp-sudah-ditandatangani-jokowi,diakses%20pada%2011/09/2020%20pukul%2012.00%20WIB)

¹² Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta), hal.81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Di dalam setiap masyarakat dimanapun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status “darah biru” atau keturunan tertentu yang terhormat maupun bernilai ekonomis.¹³

Kedudukan berbeda dengan individu yang mendudukinya, yaitu adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat diwujudkan dengan perantara. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua kedudukan. Pertama, *ascribed status* adalah kedudukan seseorang tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan diperoleh karena kelahirannya. Dan kedua, *achieved status* adalah kedudukan seseorang yang dicapai dengan usaha-usaha sesuai dengan kemampuannya. Tiada kedudukan tanpa peranan, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, peranan merupakan aspek dinamis dari status, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tereletak pada kedudukannya.¹⁴

Begitu juga halnya dalam bidang pekerjaan, termasuk dalam sebuah pemerintahan. Dengan adanya perbedaan status pegawai dalam melaksanakan pekerjaan didalam suatu organisasi, maka akan menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh setiap pegawai.

Dari uraian diatas, penulis berasumsi jika permasalahan dari terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 menarik jika ditinjau dari Fiqh Siyasah, yang akan dibahas secara mendalam dalam skripsi ini yang penulis susun dengan judul “**Analisis Terhadap Peraturan**

¹³ Reza Haridsyah Lubis, “Pengaruh Perbedaan Status Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Panyabungan Utara”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018) hal.30

¹⁴ *Ibid.*,

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tidak meluas ke pembahasan lain, maka diperlukan batasan masalah dalam meneliti. Penulis membatasi masalah ini hanya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tinjauan fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dalam penelitian ini maka masalah yang penulis rumuskan yaitu :

1. Bagaimana prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana dampak pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 terhadap sistem kerja pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dampak pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020 terhadap sistem kerja pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020.

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai prosedur dan dampak dari pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perspektif Fiqh Siyasah terhadap pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020.

Manfaat praktis :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dalam keperluan praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneletian selanjutnya berkaitan dengan perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2020.
2. Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dari sumber kepustakaan berupa data yang relevan dengan pembahasan.

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ini berdasarkan bahan hukum yang dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁶ dan bahan hukum tersier. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta:Bandung),

¹⁶ Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika:Jakarta),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelakunya.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang No. 19 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dengan menggunakan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, jurnal hukum dan penelitian-penelitian terdahulu

¹⁷ Teresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, 2016, hal.195

yang memiliki kemiripan dengan judul sehingga dapat menunjang penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi ialah suatu metode yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini penulis akan membagi dan menyusun menjadi lima bab dan dilengkapi dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020

Bab ini memuat tentang sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, dasar hukum keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi, dan struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam bab ini juga diuraikan latar belakang dan pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Dan muatan isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III : KONSEP TEORITIS

Bab ini memuat tentang Islam dan negara, struktur Islam dan negara, persoalan *wuzarah* (kementrian), urgensitas lembaga dalam negara, serta korupsi dalam pandangan Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang prosedur dan dampak pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020, serta menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap hal itu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan, yakni pembahasan singkat secara menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020

A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Masa Presiden Soekarno

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Setelah menang Pemilu 1955, Soekarno menunjuk mantan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo jadi formatur kabinet pada 8 Maret 1956. Akhirnya, kabinet kedua Ali Sastroamidjojo terbentuk pada 20 Maret 1956.¹⁸

Masa kabinet Ali ini menuai kekecewaan masyarakat karena gagal melanjutkan upaya pemberantasan korupsi pemerintahan Burhanuddin.¹⁹ Adanya penangkapan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani terkait dugaan korupsi berupa kesepakatan dengan Lie Hok Tay, Wakil Direktur Percetakan Negara oleh pasukan Jawa Barat. Karena kekhawatiran Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo terhadap kredibilitas pemerintahannya, maka ia memerintahkan untuk membatalkan surat penangkapan dan Roeslan Abdulgani dilepaskan.

Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk komite *ad hoc* yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Muhammad Roem untuk memeriksa bukti dugaan korupsi itu. Komite memutuskan bahwa bukti yang

¹⁸ Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi : Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*, (Jakarta: PT. Centro Inti Media, 2018), hal. 94

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan pasukan Jawa Barat dalam usaha mereka menangkap Roeslan Abdulgani tidak memadai dan mereka tidak punya dasar untuk menindak Roeslan Abdulgani.

Namun, terjadi peristiwa yang mempermalukan pemerintahan Ali Sastroamidjojo pada Desember 1956. Di pengadilan redaktur Indonesia Raya Mochtar Lubis berhasil menunjukkan dokumen dan foto-foto yang meyakinkan bahwa Roeslan Abdulgani menerima rumah dan mobil dari Lie serta melanggar regulasi dengan membawa valuta asing ke luar negeri. Akhirnya Roeslan Abdulgani dituntut oleh Jaksa Agung dan pada April 1957 dinyatakan bersalah karena mengeksport mata uang asing secara ilegal.²⁰

Selama kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, partai dan pemerintahan parlementer dengan cepat kehilangan legitimasinya karena ketidakmampuan mereka menyelesaikan problem tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Merespon kekecewaan publik yang mendalam, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Soekarno pada 14 Maret 1957. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Nasution melakukan lobi intensif untuk menyatakan darurat guna menangani pemberontakan di berbagai daerah dan juga menghindari perpecahan internal. Soekarno mengumumkan keadaan darurat, maka demokrasi parlementer berakhir.²¹

Pada tahun 1957 pula Soekarno membentuk kabinet baru yang dikenal sebagai “Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer”. Dengan

²⁰ *Ibid*, hal.97

²¹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjuk teknokrat berpengalaman yakni Djuanda sebagai Perdana Menteri. Para anggota kabinet ditunjuk tidak mewakili partai politik dan meliputi sejumlah figur yang ahli.

Dalam keadaan darurat ini, tentara justru menjalankan sejumlah langkah pemberantasan korupsi yang merupakan hasil rapat pimpinan Angkatan Darat Maret 1957. Fokus langkah pemberantasan korupsi ialah menyelidiki para politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi. Hubungan Angkatan darat dan partai-partai politik menjadi tegang karena tentara menyelidiki sejumlah politikus.

Keadaan darurat ini memberi peluang bagi Angkatan Darat untuk memperluas peran politiknya melalui penunjukkan untuk menduduki jabatan pegawai negeri sipil atau kepala pemerintahan daerah. Berkat keadaan ini juga Angkatan Darat memperluas peran dalam perekonomian, seperti pengambil alihan perusahaan milik Belanda yang jelas memperlihatkan keterlibatan bisnis. Namun, peluang dari keadaan darurat ini malah menjerumuskan beberapa perwira tentara dalam korupsi dan kasus ini melemahkan posisi Angkatan Darat.

Pada tahun 1959 PKI mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satunya ialah keterlibatan tentara dalam perusahaan negara sehingga menjadi tidak efisien dan korup. PKI menyiapkan dan membantu melancarkan serangan politik terhadap para pejabat korup atau manajer badan usaha milik negara.

Soekarno menekankan perlunya “*meretool*” semua alat negara dan menyingkirkan “unsur-unsur liberal”. Untuk melaksanakan tugas ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulanya ia membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan), yang tanggung jawabnya adalah mengawasi setiap aktifitas yang dilakukan aparatur negara. Bapekan menerima respon penuh semangat dari masyarakat, yang melapor adanya kasus-kasus korupsi besar maupun kecil. Lembaga kedua didirikan pada Januari 1960 dan bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang diprakarsai oleh Jenderal Nasution. Nasution menghendaki Paran berfokus pada upaya reformasi tata kelola pemerintahan terutama reorganisasi, manajemen personel, dan pemberantasan korupsi.²²

2. Masa Presiden Soeharto

Melalui krisis ekonomi yang gejalanya mulai terlihat pada bulan Mei 1997, banyak pihak mulai terbuka menunjuk pada praktik-praktik monopoli, proteksionisme, kolusi, dan nepotisme sebagai akar penyebabnya. Dalam kontroversi itu, ada pencampuran antara fakta objektif dengan tujuan subjektif dari keinginan-keinginan untuk melakukan pergantian kekuasaan.²³

Krisis ekonomi dikatakan bukan merupakan soal fundamental ekonomi yang jelek, tetapi lebih merupakan krisis kepercayaan. Tema yang berkembang seputar krisis kepercayaan ini mencakup korupsi, monopoli, proteksi, kolusi, subsidi, inefisien, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi ekonomi, reformasi ekonomi, serta reformasi.

²² *Ibid*, hal. 106

²³ Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hal.176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tekanan berat yang datang dari krisis ekonomi dan vitalitas nilai rupiah yang memporakporandakan fundamental ekonomi Indonesia yang banyak orang menilai bersumber dari krisis kepercayaan. Timbulnya kerusuhan dan amuk massa karena krisis kepercayaan tersebut, menekan lebih jauh yakni melakukan reformasi politik termasuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dan Presiden Soeharto menyatakan berhenti, kurang dari 80 hari dari masa jabatannya periode 1998-2003, yakni pada 21 Mei 1998.²⁴

Usaha pemberantasan korupsi pada masa Presiden Soeharto tidak terlalu terfokuskan karena tindakan korupsi itu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Terjadinya krisis ekonomi yang dapat dikatakan parah dan munculnya kerusuhan dari rakyat juga merupakan tekanan berat yang membuat usaha pemberantasan korupsi di masa itu terbilang sulit.

3. Masa Presiden B.J Habibie

B.J Habibie mengambil alih jabatan Presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Pada masanya Habibie berhasil mewujudkan reformasi elektoral terbatas. Ia memberi pengarahannya kepada para menteri tentang reformasi elektoral pada Mei 1998 dengan merombak undang-undang dan regulasi partai politik.²⁵

B.J. Habibie bersama MPR menyelenggarakan sidang istimewa pada akhir tahun 1999, dan melalui sidang istimewa itu sebuah Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

²⁴ *Ibid.*, hal.184

²⁵ *Op.Cit.*, hal.194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dihasilkan dalam sidang istimewa MPR tanggal 13 November 1998, nama Presiden Soeharto diabadikan sebagai target pemberantasan KKN.²⁶

Di dalam pemerintahan era reformasi ini telah menggeser pula perbincangan-perbincangan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto, keluarga cendana dan konglomerat, kepada pembicara-pembicara korupsi, kolusi, dan nepotisme ke berbagai lokasi kekuasaan yang tersebar seperti lembaga legislatif, lembaga penegak hukum, lembaga perbankan yang menjalar sampai pada gubernur dan bupati. Pemberantasan KKN seperti yang dituduhkan sangat keras terhadap pemerintah Orde Baru sampai sejauh itu tidak pernah benar-benar mampu dilaksanakan.²⁷

4. Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Sesuai pemilihan umum 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR dengan suara 355 banding 322 pada 19 Oktober 1999. Karena itulah di mengumumkan mundur dari pencalonan presiden pada Oktober 1999.

Dengan mundurnya Habibie, Megawati Sukarno menjadi calon presiden terkuat selanjutnya karena PDIP memenangkan pemilihan legislatif dengan lebih dari 33 persen suara. Sementara itu, dua pemimpin Islam terkemuka, Gus Dur dari PKB dan Amien Rais dari PAN, dengan cerdas memanfaatkan kegagalan kampanye kepresidenan Megawati

²⁶ *Op.Cit.*, hal.205

²⁷ *Ibid.*, hal.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan membentuk koalisi Isam yang disebut poros tengah, mengusulkan Gus Dur menjadi presiden. Megawati kalah di MPR dengan suara 313 banding 373 dengan dukungan krusial dari Golkar yang melambungkan Gus Dur menjadi presiden keempat.²⁸

Baru sebulan menjabat, pada Desember 1999, Laksamana Sukardi mengangkat dugaan korupsi terkait perusahaan tekstil terbesar Indonesia Texmaco milik Marimutu Sinivasan. Laksamana menyampaikan setumpuk dokumen yang mengungkapkan penyalahgunaan “fasilitas impor pra-pengapalan” dan juga pinjaman kepada Texmaco dari bank milik, yang melanggar batas maksimum pemberian kredit. Pada Desember 1999 Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Marimutu terlibat dalam dugaan korupsi terkait penyalahgunaan pinjaman dari sejumlah bank milik negara senilai Rp 9,8 triliun.²⁹

Meski begitu usaha-usaha Laksamana dan Marzuki untuk mengungkapkan dugaan korupsi Texmaco tidak mendapatkan dukungan Gus Dur. Akhirnya Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan pada Mei 2000 karena sebuah audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengungkapkan bahwa Texmaco tidak menimbulkan kerugian negara.

Gus Dur mengumumkan bahwa Soeharto akan diampuni begitu divonis bersalah, dengan syarat dia mengembalikan bagian besar kekayaannya. Setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung, Marzuki Darusman

²⁸ *Ibid.*, hal.203

²⁹ *Ibid.*, hal.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa penindakan dugaan korupsi Soeharto adalah prioritas tertingginya. Pada mulanya, Jaksa Agung bekerja cepat dengan menolak SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan melakukan investigasi.³⁰

Pada saat bersamaan, Gus Dur juga mengutus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SBY untuk berunding dengan keluarga Soeharto tentang kemungkinan pengembalian bagian besar kekayaan mereka diperoleh secara legal. Akhirnya pemerintah membatalkan perundingan itu karena kontroversi publik yang menyelimuti proses tersebut.

Kemudian Soeharto diperiksa di rumahnya oleh Kejaksaan Agung selama dua jam pada Mei 2000 mengenai potensi penyalahgunaan dana dalam Yayasan Supersemar miliknya dan selanjutnya didakwa secara formal melakukan korupsi karena menyalahgunakan kedudukannya sebagai ketua tujuh yayasan yang menimbulkan kerugian negara sebesar 416 juta dolar AS. Dakwaan kedua terhadap Soeharto adalah penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan dakwaan setelah Soeharto tidak bisa hadir di pengadilan karena masalah kesehatan.³¹

Dibawah pemerintahan Gus Dur ada sebuah upaya untuk membersihkan peradilan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada April 2000 yang mencakupi para pejabat penegak hukum dan unsur-unsur masyarakat sipil. TGPTPK dipimpin oleh mantan hakim agung Adi Andoyo yang memiliki

³⁰ *Ibid.*, hal.207

³¹ *Ibid.*, hal.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan besar karena bisa menyadap pembicaraan dan meminta pembekuan rekening bank yang mencurigakan.

Dilanjutkan dengan pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), sebanyak 35 orang anggota diseleksi oleh Gus Dur dan pada akhirnya dipimpin oleh Yusuf Syakir dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Januari 2001. Sayangnya KPKPN tidak memiliki staf atau kewenangan yang memadai untuk memberi sanksi bagi pejabat publik yang menyembunyikan kekayaan mereka.³²

5. Masa Presiden Megawati

Pada 23 Juli 2001 MPR melaksanakan Sidang Istimewa, mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden dan pada hari yang sama melantik Megawati sebagai presiden kelima. Megawati mencapai kesepakatan dengan Poros Tengah untuk menunjuk Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.³³

Selama kepresidenan Megawati, tak banyak kemajuan yang dicapai dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar melalui proses penegakan hukum, terutama saat Megawati menunjuk M.A. Rachman pejabat karier Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Agung.³⁴

Sejak ditunjuk sebagai Ketua DPR pada 1999, Akbar Tandjung dibebani oleh pemeriksaan kasus korupsi penyalahgunaan dana non-bujeter Bulog senilai Rp 40 miliar saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. PDIP yang dipimpin oleh Megawati menyulut emosi

³² *Ibid.*, hal.231

³³ *Ibid.*, hal.214

³⁴ *Ibid.*, hal.228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekecewaan publik ketika menolak upaya DPR untuk membentuk sebuah komite etik guna menyelidiki kasus Akbar Tandjung pada Juni 2001 dengan pertimbangan memastikan kelanjutan dukungan Golkar dan menyandera Golkar lewat pengadilan korupsi yang berlarut-larut.³⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada September 2002, menyatakan Akbat Tandjung bersalah dan menghukumnya tiga tahun penjara. Pada Agustus 2001, Megawati menyatakan bahwa dirinya meminta keluarganya agar jangan membiarkan ada kesempatan bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski begitu, pada akhirnya pemerintahan Megawati terlibat dalam sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran orang dalam dan keluarganya terutama suaminya, Taufik Kiemas yang membantunya memasuki dunia politik pada 1990-an.³⁶

KPKPN berhasil meyakinkan Megawati dan para pejabat tinggi negara yang lain untuk menyerahkan laporan kekayaan. KPKPN berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung M.A Rachman, karena rumah mewahnya seharga 543.000 dolar AS tidak dilaporkan. Akhirnya KPKPN menimbulkan ketidaknyamanan bagi elite politik. Karena ketidaknyamanan itulah DPR bersekongkol untuk menggabungkan KPKPN ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dibentuk dengan RUU KPK pada 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia.

³⁵ *Ibid.*, hal.229

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Pada Desember 2003 Taufiequrachman Ruki dilantik menjadi Ketua KPK.³⁷

6. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kampanye pemberantasan korupsi paling agresif di Indonesia dimulai semasa kepresidenan SBY, diawali dengan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada 2005, sekalipun yang paling penting adalah berfungsinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang boleh dikatakan merupakan badan pemberantasan korupsi paling efektif yang pernah dibentuk di Indonesia.

Langkah pertama yang diambil SBY adalah membersihkan “rumahnya” sendiri dari korupsi untuk menggugah dan mengajak rakyat melakukan langkah yang sama. Rumah yang dimaksud adalah Sekretariat Negara, termasuk yayasan-yayasannya, Sekretariat Kabinet, Kantor Presiden, dan Kantor Wakil Presiden. Selain membersihkan korupsi di lingkungannya, langkah lainnya adalah mencari dan menemukan terpidana yang telah dijatuhi hukuman atau yang sedang menjalani proses hukum yang diduga kuat berada di luar negeri.³⁸

Langkah kedua, mencegah besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan pengadaan barang dan korupsi pengadaan barang.

Langkah ketiga, mencegah penyimpangan, termasuk tender proyek-proyek

³⁷ Melkisedek Bagas, *Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri*, (Kacamantan Barat: PT.Maraga Borneo, 2013), hal.3

³⁸ SBY, *Strategi Pemberantasan Korupsi Era SBY*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2020), hal.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rekonstruksi yang besar. Keempat, mencegah penyimpangan tender bagi pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Kelima, berdasarkan bukti-bukti permulaan dan dugaan kuat, terjadi korupsi dan penyimpangan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah hukum.³⁹

Presiden SBY menunjukkan tekadnya untuk memberantas korupsi dengan membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim *Task* Tipikor yang beranggotakan 48 orang dan diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Hendarman Supandji. Tim yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 yang ditandatangani Presiden SBY, tugas Tim *Task* Tipikor adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. tugas berikutnya mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.⁴⁰

B. Dasar Hukum Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid., hal.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi⁴¹. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

⁴¹ Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi*, Suska Press : Pekanbaru, 2011, hal. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu lapis ketiga atau *auxiliary state organ*. *Auxiliary state organ* adalah organ, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh sebagian ahli menyebutnya dengan istilah komisi. Menurut Lembaga Administrasi Negara, *auxiliary state organ* disebut juga Lembaga Nonstruktural (LNS) adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara yang konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugas.⁴²

Yang dimaksud dengan Lembaga Nonstruktural (LNS) ialah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada .⁴³

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴² Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 338

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keterbukaan atau prinsip transparansi yakni semua informasi yang terkait dengan pengelolaan negara dan pemerintahan harus berani dipublikasi secara transparan, kecuali jika da rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui oleh masyarakat karena dapat menyebabkan kelemahan atau mengancam negara.

Dalam prosesnya, terdapat lima proses dalam keterbukaan atau transparansi, yaitu⁴⁴ :

1. Penganggaran yang prosesnya bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*), mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.
2. Proses penyusunan kegiatan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) pada semua tingkatan.
3. Pembahasan berisi tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah.
4. Pengawasan berisi tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis.

⁴⁴ Chatrina Darul, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggara kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan fisik dari setiap *output* kerja pembangunan.
6. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seorang/badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dituntut akuntabilitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi, dan aparatur penyelenggara pemerintahan wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala sikap, perilaku, peranan, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan dapat diarahkan pada tujuan institusional dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hal.85

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 2) Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Korupsi, dan
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang⁴⁸ :

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggara program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang⁴⁹ :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Korupsi kepada instansi yang terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 7

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang⁵⁰ :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang⁵¹ :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara, dan/atau
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan, dan juga berwenang dalam :

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 9

⁵¹ *Ibid*, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta koneksi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

D. Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

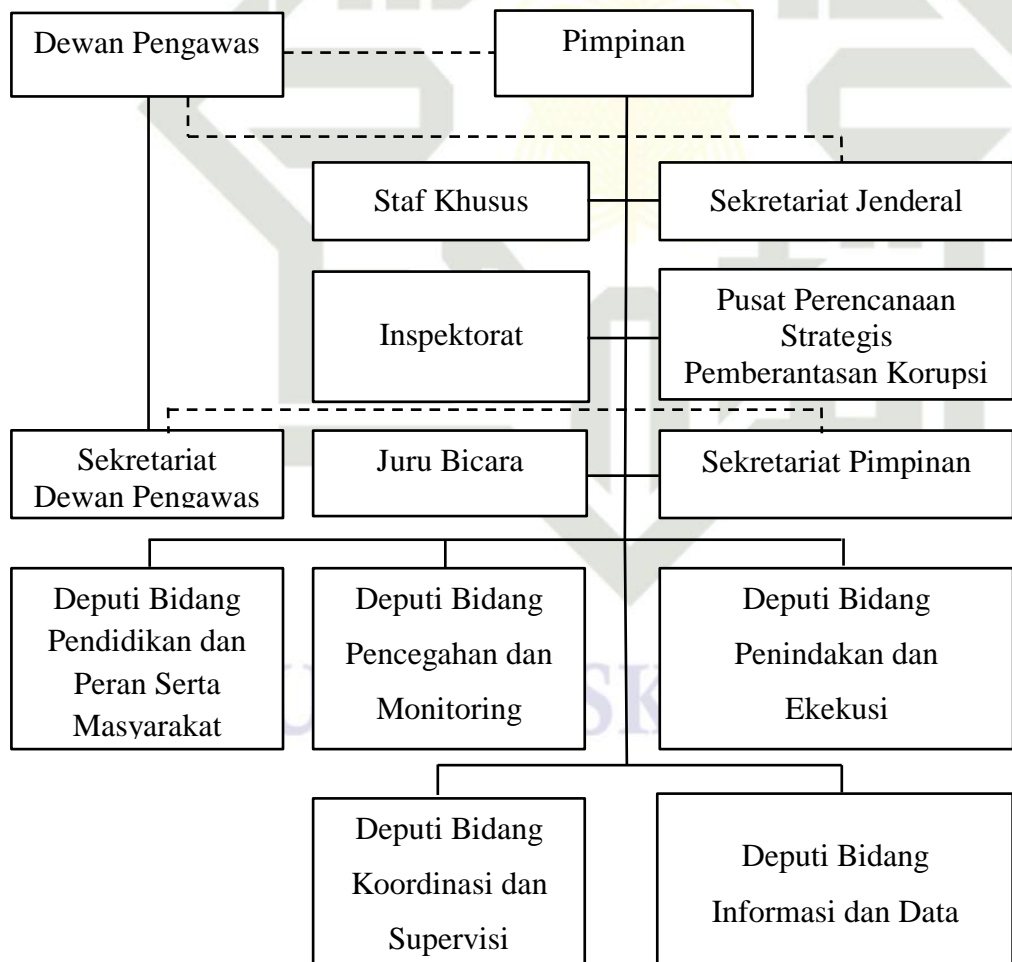
Menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 :

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Gambar II.1
Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi⁵²



⁵² <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses pada 11 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dewan Pengawas

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dewan Pengawas beranggotakan 5 (lima) orang dan memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali.

Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat jika ada dugaan pelanggaran kode etik, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵³

Dewan Pengawas dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden Republik Indonesia. Yang mana panitia seleksi tersebut terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Dan tata cara pengangkatan ketua beserta anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁴

2. Pimpinan KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara. Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 37B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota, dan
- b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan KPK, Pemerintah membentuk panel yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Panel bertugas melakukan seluruh tahap penjangkaran dan penyeleksian calon Pimpinan KPK dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk diusulkan kepada DPR. Selanjutnya, DPR akan melakukan pemilihan terhadap calon Pimpinan KPK yang telah diusulkan Presiden.⁵⁵

Metode pengisian jabatan di KPK menggunakan metode seleksi (*selection*) dan pemilihan (*election*). DPR hanya melakukan “*political election*” yang mengedepankan ideologi calon, karena disitu akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan *technical selection* seperti dilakukan oleh panitia seleksi (panel) yang mengurus persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi.⁵⁶

Dalam hal terjadi kekosongan pada jabatan pimpinan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu, maka Presiden menandatangani Peraturan

⁵⁵ Mohd. Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen?”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 12, No. 01 (2021), hal.27

⁵⁶ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 33A Perppu No. 1 tahun 2015 yang menyatakan, dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.⁵⁷

3. Pegawai KPK

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tata cara perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan perekrutan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seleksi merupakan rangkaian kegiatan penyaringan dengan menggunakan sistem gugur melalui proses seleksi administrasi, tes potensi, pengukuran referensi, wawancara, dan tes kesehatan.⁵⁸

Persyaratan umum rekrutmen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada tuhan yang

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, hal.3

⁵⁸ Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maha esa, sehat jasmani dan rohani, berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tidak pernah dihukum penjara atau sedang dalam penyidikan, penuntutan karena tindak pidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai yang sudah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁹

E. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan Rancangan Undang-undang tahun 2002 pada masa jabatan Presiden Megawati. Komisi ini dibentuk bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengalami perubahan setelah proses yang panjang.

Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi rumpun eksekutif yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang KPK. Walaupun masuk di ranah eksekutif, KPK tetap menjadi lembaga independen.

Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui *unitary executive theory*. Teori ini menjelaskan

⁵⁹ Ibid, Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan presiden.⁶⁰ Hal tersebut memberi implikasi bahwa presiden memiliki kontrol penuh terhadap kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya.

F. Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

Pada bab pertama berisi ketentuan umum yaitu tentang pengalihan yang berarti suatu proses pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara. Yang selanjutnya pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Bab kedua berisi ruang lingkup dan persyaratan. Ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Persyaratan pengalihan pegawai yaitu berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, memiliki

⁶⁰ *Ibid*, hal. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab ketiga berisi tentang mekanisme pengalihan yaitu melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab keempat berisi tentang gaji dan tunjangan yaitu pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Bab kelima berisi tentang ketentuan peralihan, yakni pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh pegawai KPK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan dalam jabatan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Islam dan Negara

Negara adalah instrumen penting dalam kehidupan masyarakat di manapun berada. Keberadaan negara selalu dibutuhkan oleh setiap orang selain sebagai tempat bernaung, juga sebagai sarana ekspedisi. Manusia sebagai makhluk *zoon politicon*, tentunya negara adalah tempat yang tepat ia wujudkan segala hakikat keberadaannya sebagai makhluk sosial yang memiliki cita-cita dan harapan dalam rangka aktualisasikan diri menjadi manusia yang seutuhnya (*kamil*).⁶¹

Menurut Ibnu Abi Rabi' negara lahir karena manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang mendorong manusia untuk berkumpul dan membentuk negara. Ibnu Abi Rabi' menambahkan, manusia adalah makhluk sosial dan berbudaya yang cenderung untuk bermasyarakat.⁶²

Secara garis besar terdapat dua teori besar yang menjelaskan asal-usul sebuah negara. Pertama, negara terjadi secara primer (*primaire staats wording*), yakni negara terbentuk tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Kedua, negara terjadi secara sekunder, yaitu sebalik daripada yang pertama, negara terwujud berkaitan dengan negara yang sudah berdiri sebelumnya.⁶³

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam (Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2016), hal.1

⁶² *Ibid.*, hal.2

⁶³ *Ibid.*, hal.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan dan perkembangan negara secara primer melalui empat fase. Pertama, fase *genootshap* yaitu negara terjadi karena penggabungan kepentingan bersama yang disandarkan pada persamaan. Kedua, fase *reich* yaitu keinginan penggabungan diri karena kepentingan akan hak milik tanah hingga muncul tuan tanah. Ketiga, fase *staat* yaitu telah memiliki kesadaran untuk berada dalam satu kelompok. Keempat, fase *democratische natie* dan diatur yaitu atas kesadaran demokrasi nasional di mana rakyat merupakan pihak yang memegang kedaulatan.⁶⁴

Sedangkan pembentukan dan perkembangan negara secara sekunder adalah pembahasannya seputar masalah pengakuan (*erkening*), terdapat tiga macam bentuk pengakuan. Pertama, pengakuan *de facto* (pengakuan sementara berdasarkan fakta empiris bahwa negara sudah ada, namun masih perlu menunggu pengakuan secara hukum). Kedua, pengakuan *de jure* (pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap terbentuknya negara baru secara yuridis). Ketiga, pengakuan atas pemerintahan *de facto* (pengakuan hanya terhadap pemerintah suatu negara dan bukan pengakuan atas negara).

Para ulama dan politisi Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-islam huwa ad-din wa ad-daulah*). Doktrin ini mengandung sebuah anggapan dasar bahwa agama Islam memiliki dimensi politik dan dimensi ritual. Doktrin menyatakan bahwa Islam dan politik tidak terpisahkan, agama dan negara merupakan dua objek penting dalam politik Islam. Antara

⁶⁴ *Ibid.*, hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama dengan politik tidak kontradiktif, keduanya memiliki hubungan fungsional, yaitu kekuasaan politik berfungsi melindungi agama dan agama berfungsi mengawal kekuasaan politik.⁶⁵

Doktrin pengintegrasian antara agama dengan negara yang tercermin dalam ajaran *al-islam huwa ad-din wa ad-daulah* tidak mengandung arti bahwa terjadi campur aduk antara keduanya. Oleh karena itu, tidak muncul dugaan dan keyakinan bahwa kebenaran agama adalah kebenaran politik dan kebenaran politik adalah kebenaran agama.

Kebenaran politik tetap sebagai kebenaran subjektif dan objektif, sedangkan kebenaran agama tetap sebagai kebenaran sejati. Kebenaran subjektif mengukur benar salah dari kepentingan personal. Kebenaran objektif mengukur benar salah berdasarkan nalar sosial (pandangan orang banyak). Adapun kebenaran sejati adalah kebenaran yang berdasar pada wahyu Tuhan.⁶⁶

Secara umum kajian Islam, politik dan negara menyangkut beberapa hal, yaitu sumber kekuasaan, hukum, dan ketaatan kepada negara.

1. Sumber Kekuasaan

Kalangan Syi'ah memandang bahwa kekuasaan adalah hak yang ditentukan berdasarkan penunjukan. Dalam tradisi pemikiran mereka berkembang teori *tanishish*, yaitu bahwa kekuasaan telah ditentukan secara pasti oleh suatu dalil. Teori *tanishish* menghasilkan mekanisme sistem kewarisan (*wiratsah*) dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga politik yang

⁶⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hal.290

⁶⁶ *Ibid.*, hal.291

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan sistem kekuasaan tersebut bernama imamah yang dipimpin oleh seorang imam.⁶⁷

Berdasarkan teori *tanshish*, kekuasaan sejati bukan sesuatu yang tidak ada dan harus diusahakan, melainkan telah tersedia dan terpetakan dalam satu lanskap yang mapan dan terbatas. Oleh sebab itu, kekuasaan tidak bisa didapatkan melalui mekanisme pemilihan, melainkan oleh jalur keturunan (*wiratsah*). Implikasi dari teologi semacam ini muncul sebuah mesinianisme politik, yaitu suatu keyakinan bahwa pemilik kekuasaan sejati bukan masyarakat saat ini, melainkan sosok misteri yang akan datang nanti.

Sistem kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat saat ini hanya sebuah atraksi kontemporer yang tidak memiliki relevansi dengan makna kekuasaan yang sah secara nash. Kekuasaan sejati adalah milik sosok otoritatif yang akan diambilnya pada saat yang telah dipastikan.

Para pemikir Sunni memandang bahwa sumber kekuasaan politik adalah Allah yang dimandatkan kepada rakyat. Kekuasaan merupakan kesepakatan masyarakat melalui suatu mekanisme politik, baik melalui pemilihan secara langsung (*intikhab*), atau kesepakatan elite yang representatif (*syura*), atau penunjukan putra mahkota (*wilayah al-'ahd*). Kekuasaan yang didapat dari rakyat dapat melalui penunjukan atau musyawarah. Dalam tradisi pemikiran Sunni, kekuasaan dijalankan oleh sebuah lembaga bernama khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.⁶⁸

⁶⁷ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010),

⁶⁸ Jubair Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 292

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum

Kajian sistem ketatanegaraan Islam memandang hukum yang berlaku dalam negara merupakan hukum syariat. Secara operasional sumbernya al-qur'an dan as-sunnah. Para pembuat aturan kenegaraan dan kemasyarakatan bertanggung jawab secara teologis untuk mengacu pada dua sumber tersebut. Hukum dalam negara bukan berasal dari masyarakat, melainkan berasal dari tuhan, sehingga mereka tidak dapat memengaruhinya.

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mesti menaati hukum. Hal itu disebabkan, ketaatan pada hukum adalah ketaatan pada tuhan, sedangkan menentang hukum adalah menentang tuhan.⁶⁹

Ketika secara teks hukum diyakini sebagai sesuatu yang wajib ditaati, negara hanya terbebani membangun teks hukum, tidak harus membangun sistem sanksi. Suatu negara yang tidak berhasil membentuk keyakinan masyarakat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum suci akan terbebani dengan tiga hal, yaitu :

- a. Pembentukan petugas hukum yang berwibawa dan ditaati beserta beban-beban yang harus ditanggungnya
- b. Pembentukan petugas keamanan yang kuat dan diikuti beserta beban-beban yang mengikutinya
- c. Menyelenggarakan praktik penegakan hukum yang birokratis dan hierarkial.

⁶⁹ *Ibid.*, hal.293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila tiga hal ini tidak dapat dilaksanakan, negara yang bersangkutan akan gagal membangun sistem hukumnya.

3. Ketaatan pada Negara

Konsep yang disepakati oleh seluruh ahli ketatanegaraan Islam, tunduk kepada pemerintah (negara) merupakan kewajiban selama tidak diperintah untuk berbuat menentang Allah dan Rasul-Nya. Penentangan terhadap sebuah kekuasaan yang sah merupakan perbuatan dosa yang memiliki hubungan erat dengan legalitas keagamaan seseorang.⁷⁰

Terdapat dua aliran hukum mengenai ketaatan pada negara. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa ketaatan pada negara merupakan kewajiban mutlak, sekalipun pemerintah yang menjalankannya bukan orang baik (pelaku kefasikan). Pandangan ini dipegang oleh kebanyakan ahli politik Islam dari kalangan Sunni. Kedua, aliran yang menyatakan bahwa ketaatan pada negara terbatas dengan keadaan para pemegang kekuasaan.

Apabila kekuasaan dijalankan dengan benar dan tidak melanggar syariat, ketaatan kepada negara adalah wajib. Sedangkan, bila negara dijalankan secara korup, tidak ada kewajiban taat pada negara dan mesti dilakukan perlawanan. Pandangan ini dipegang oleh kalangan Khawarij dan sebagian pengikut sekte Syi'ah.⁷¹

Ketaatan pada negara memiliki relevansi dengan keyakinan teologi secara umum tentang kedaulatan Allah. Keyakinan ini menandakan bahwa

⁷⁰ Ija Suntana, *Op. Cit.*, hal.25

⁷¹ *Ibid.*, hal.25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu-satunya penguasa alam ini hanya Allah. Dia mendelegasikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki-Nya melalui suatu kekuasaan negara. oleh sebab itu, kekuasaan negara memiliki makna yang sejalan dengan sifat kekuasaan tuhan, tidak terbantahkan. Apapun yang dibuat dan diputuskan oleh negara, terutama hukum dan sanksi, mengikat secara permanen bagi siapa saja. Keyakinan ini memiliki manfaat penting untuk supremasi hukum dan kekuasaan, tetapi tidak relevan dengan pengembangan demokrasi.

Ketaatan pada negara memiliki kaitan erat dengan keyakinan bahwa pengatur tatanan dunia hanya bisa dilakukan oleh negara sebagai wakil Allah, tidak bisa dilakukan secara perseorangan. Keputusan-keputusan perorangan tidak memiliki daya ikat apapun. Sementara itu, keputusan-keputusan negara memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang mengikat bagi setiap individu, sehingga dapat mengambil dan memberi hak dari/dan kepada seseorang.

Pemindahan, pengakuan dan pengambilan hak seseorang hanya bisa dilakukan melalui institusi yang bernama negara. Tidak ada masyarakat yang bisa mengatur dirinya sendiri terkait dengan hak-hak mereka. Setiap keputusan dan aturan yang tidak bersumber dari negara dianggap tidak sah.

Terkait dengan keyakinan ini, hukum adat dan agama yang berkembang tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, kecuali dilegitimasi terlebih dahulu oleh negara. Terkait dengan ini pula, dalam sejarah sosial hukum Islam ditemukan bahwa para Khalifah mengambil alih kekuasaan hukum dari fuqaha untuk menjadi domain negara agar hukum memiliki kekuatan yang diterima dan dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pengertian budaya, istilah negara Islam mengacu pada komunitas di seluruh dunia yang menganut agama Islam dan sering disebut dunia Islam (*Islamic world*). Komunitas ini mencapai seperlima penduduk dunia, yang tersebar di antara berbagai bangsa dan kelompok etnis. Dalam pengertian sejarah dan geopolitik, negara Islam mengacu pada istilah kolektif untuk negara-negara mayoritas muslim atau negara-negara yang sistem politiknya didominasi oleh Islam. Dalam pengertian akademik, negara Islam adalah konsepsi dan prinsip-prinsip sistem kekuasaan politik yang didasarkan pada ajaran agama islam.⁷²

Negara Islam adalah negara konsep (*daulah fikrah*), yang lebih menggambarkan doktrin politik, dibanding sebagai sains (ilmu), sebagai salah satu pilihan mazhab kekuasaan di antara mazhab-mazhab kekuasaan yang ada di dunia, seperti sosialisme dan kapitalisme. Dengan demikian, negara Islam merupakan rancangan konsep dengan materi-materi dan definisi kekuasaan yang ideal.⁷³

Secara praktis, hubungan Islam dengan negara di dunia menghasilkan dua tipe negara : (1) negara Islam dan (2) negeri muslim (*moslem countries*). Negara Islam adalah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan tercantum dalam undang-undangnya. Sementara itu, negeri muslim adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan tidak menyebut secara langsung Islam sebagai agama resmi negara, namun nilai-nilai keislaman masuk dalam ranah politik dan ranah-ranah lainnya.

⁷² Jubair Situmorang , *Op.Cit.*, hal. 296

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian modern, negara adalah kumpulan rakyat yang menempati wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan atau sistem pemerintahan tertentu. Pengertian ini memberikan batasan bahwa unsur negara terdiri atas tiga hal, yaitu : (1) rakyat atau kumpulan individu, (2) wilayah, dan (3) pemerintahan. Sama halnya dengan unsur-unsur negara Islam, tidak berbeda atas unsur-unsur dalam pengertian modern, yaitu terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan.⁷⁴

1. Rakyat

Dalam pengertian ketatanegaraan konvensional, rakyat terdiri atas dua unsur : (1) unsur materiil, yaitu kumpulan orang yang menetap secara permanen di wilayah tertentu, dan (2) unsur spiritual (maknawi), yaitu kehendak atau maksud bertempat tinggal dan hidup bersama.

Rakyat dalam pengertian negara Islam adalah kumpulan orang yang menetap di negeri Islam, yaitu komunitas muslim yang yakin terhadap Islam sebagai agama, sistem undang-undang, akidah, dan politik. Termasuk rakyat dalam pengertian negara Islam adalah orang-orang non muslim yang mengikat perjanjian damai dengan pihak penguasa dan tunduk terhadap sistem hukum yang dijalankan.

2. Wilayah

Wilayah dalam pengertian ketatanegaraan Islam adalah setiap teritorial yang berada dalam kekuasaan kaum muslim, baik daratan, lautan, maupun udara. Di wilayah tersebut setiap warga negara Islam berhak

⁷⁴ Jubair Situmorang, *Op.Cit.*, hal. 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak penuh untuk hidup dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan.

3. Pemerintahan

Pemerintahan dalam pengertian ketatanegaraan Islam badan-badan negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah di dalam wilayah negara Islam. Keberadaan pemerintahan merupakan pembeda antara kumpulan individu yang dikatakan sebagai negara dengan kumpulan individu non negara

Kriteria pemerintahan yang berdaulat dalam suatu negara adalah sebagai berikut :

- a. Ditaati oleh setiap individu untuk setiap kebijakan dan aturan yang dibuat.
- b. Dipercaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi rakyat, sehingga keputusan yang dikeluarkannya diterima oleh mereka.
- c. Setiap larangan yang dikeluarkannya diindahkan dan sanksi yang menyertainya diikuti.

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan negara adalah Al-Mawardi, yang dituangkannya dalam buku *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Ia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.

Pengertian mengelola dunia dalam tulisan al-Mawardi di atas adalah menciptakan ketertiban sosial. Sumber-sumber ketertiban sosial menurutnya adalah (1) agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia, (2) kekuasaan politik yang legitimate dan mampu memaksa, (3) keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa, (4) sistem hukum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman, (5) sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil, (6) jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Wuzarah (Kementrian)

Firman Allah dalam al-qur'an surah Thaha ayat 29-32 :

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشْدِّدْ بِهِ أَرْزِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Artinya : *dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku (29), (yaitu) Harun, saudaraku (30) teguhkan kekuatanku dengan (adanya) dia (31) dan jadikanlah dia teman dalam urusanku (32).*⁷⁵

Ulama menjadikan ayat diatas sebagai dasar dalam pembentukan wuzarah (kementrian). Pengertian wuzarah menurut bahasa dibagi menjadi tiga yaitu : Pertama, wuzarah diambil dari kata *al-wizru* yang artinya beban, karena wazir memikul beban kepala negara. Kedua, diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan wazirnya. Ketiga, diambil dari kata *al-azru* yang artinya tulang punggung, karena kepala negara dikuatkan dan didukung oleh wazirnya sebagaimana tubuh dikuatkan dengan tulang punggung.⁷⁶

Pada masa Bani Abbasiyah dibawah pengaruh kebudayaan Persia, terdapat jabatan yang disebut *wazir*. Wazir ini bertugas sebagai tangan kanan

⁷⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. Kalim : Banten, hal.

⁷⁶ A. Jazuli, *Op. Cit*, hal. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah bahkan hakim. *Wazir* juga berperan mengkoordinasi departemen-departemen (*diwan*), seperti Departemen Perpajakan (*Diwan Al-Kharaji*), Departemen Pertahanan (*Diwan Al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bait Al-Mal*). Kepala Departemen (*Shahib Ad-Diwan*) ini kadang-kadang disebut juga dengan *wazir*.⁷⁷

Ahli tata negara pada masa Abbasiyah Al-Mawardi membagi *wazir* pada dua bagian. Pertama, *wazir tafwidh* yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Kedua, *wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.⁷⁸

Pada masa Dinasti Umayyah terdapat kekuasaan kehakiman yang disebut *Nizham al-qadha* dan pada masa Abbasiyah disebut *Nizham al-Mazhalim* atau lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum. *Nizham al-mazhalim* juga disebut *Wilayah al-mazhalim*, yang merupakan suatu lembaga peradilan independen untuk menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan pemerintah. *Qadha' Mazhalim* yaitu salah satu

⁷⁷ Jubair Situmorang, *Op. Cit*, hal.249

⁷⁸ *Ibid*, hal.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

jenis peradilan yang secara khusus bertugas menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat negara.⁷⁹

Tugas *Wilayah al-mazhalim* ialah⁸⁰:

1. Menyelesaikan perkara pelanggaran hukum dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara.
2. Memeriksa segala bentuk kecurangan para petugas dalam menjalankan tugasnya.
3. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen (sekretaris), karena mereka merupakan orang yang dipercaya kaum muslim untuk mencatat hak mereka dalam harta mereka.
4. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum (kedzaliman) terhadap pegawai.
5. Harta rampasan yang diambil harus dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Menangani harta wakaf, yang terbagi antara wakaf khusus dan umum.
7. Mengeksekusi terdakwa yang tidak dapat dihukum atau terdakwa tersebut merupakan orang terhormat yang takut di eksekusi.
8. Menangani kepentingan umum yang tidak bisa diselesaikan oleh para muhtasbih (petugas hisbah).
9. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah.
10. Memberikan putusan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara.

⁷⁹ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Keistanaan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 172

⁸⁰ *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C Urgensi Lembaga dalam Negara

Dalam proses penyelenggaraan negara yang baik, diperlukan adanya penyelenggara yang mumpuni diberbagai bidang untuk mencapai tujuan dan keinginan negara. Kesiapan para penyelenggara negara untuk menjalankan roda kehidupan bernegara menjadi faktor paling penting.

Merujuk pada bahasa Belanda yakni “*Staatsorgaan*” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Lembaga merupakan alat perlengkapan negara yang dalam istilah lain disebut dengan organ, badan, forum, instansi, institusi, komisi-komisi negara, atau juga badan-badan independen.⁸¹

Terdapat karakteristik penting dari sebuah organ atau lembaga dalam arti sempit, lembaga negara yang ditunjuk atau dipilih untuk tujuan tertentu pelaksanaan fungsinya menjadi keutamaan atau bahkan secara hukum dapat bersifat eksklusif, dan organ tersebut berhak menerima gaji dari keuangan negara. Lembaga negara yang diciptakan melalui penunjukkan dan pemilihan berbeda karakter dan posisi hukumnya.

Misalkan pembentukan komisi-komisi negara yang pembentukannya bersumber dari konstitusi dan Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya suatu lembaga superior, yang mampu menciptakan lembaga-lembaga negara lainnya.⁸²

⁸¹ Angga Anjaya, “*Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal.13

⁸² Retno Mawarini Sukmariningsih, “Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Pemerintahan Indonesia”, Volume 25, No.2, 2014, hal.199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep organ negara dan lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Konsep/pengertian organ negara dan lembaga negara itu adalah⁸³ :

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law creating* dan *law applying*
2. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law creating* atau *law applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan
3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law creating* dan/atau *law applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Di dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatnya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.
4. Dalam pengertian ini lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.
5. Untuk memberikan terkhususkan kepada lembaga-lembaga negara yang berada ditingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh

⁸³ Teuku Saiful Bahri Johan, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945, yaitu lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden), MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri karena kedudukannya yang tinggi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan keempat di tahun 2002 terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar, diantaranya yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, ada pula lembaga yang diatur kewenangannya di dalam Undang-Undang yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.⁸⁴

Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara sifatnya saling membatasi antara satu dengan yang lain atau *checks and balances*.⁸⁵ Perwujudan adanya prinsip *checks and balances* antara lain adalah pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara demokrasi yang dipahami dengan memperhatikan kedaulatan rakyat dalam membentuk Undang-Undang dan kekuasaan negara dapat di kontrol.

⁸⁴ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.159

⁸⁵ Kelik Iswandi, Nanik P, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia", Volume 26, No. 4, hal.435

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Korupsi dalam Pandangan Islam

Kekayaan dan usaha mendapatkannya, dalam perspektif Islam bukanlah tercela. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan dan menggunakan hartanya. Salah satu prinsip pokok yang akan diwujudkan dengan syari'at ialah pemeliharaan harta dari pemindahan harta hak milik yang tidak sejalan dengan hukum dan dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Korupsi merupakan salah satu pemindahan sekaligus pemanfaatan harta milik yang tidak sejalan dengan prinsip pokok yang dimaksud.

Firman Allah dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁸⁶

Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kepada masyarakat umum, tentu karena syariat memandang ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku korupsi. Secara garis besar, korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

⁸⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. Kalim : Banten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah dari dilarangnya korupsi ialah pertama, memelihara dan menegakan nilai-nilai keadilan serta menghindari kezaliman. Kedua mendidik masyarakat agar membiasakan mendayagunakan harta benda sesuai dengan petunjuk-Nya, mampu menghargai nilai-nilai kebenaran hakiki dan tidak diperjualbelikan dengan nilai-nilai kebendaan. Ketiga, mendidik para penguasa, pejabat, pelayan masyarakat agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat, dikarenakan perbedaan status atau kekayaan. Keempat, menyadarkan masyarakat bahwa hakikat kebenaran itu adalah yang datang dari dan ditetapkan oleh Allah swt, bukan dari manusia.⁸⁷

⁸⁷ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal.232

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima poin yakni melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalamann pegawai KPK, melaksanakan pengalihan pegawai KPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak pada karakter pegawai yang semula independen, menjadi dependen dan terikat pada peraturan kepegawaian ASN, Status Penyidik PNS yang menjadi di bawah koordinasi dan pengawasan Polri dan terganggunya penanganan kasus yang dilakukan KPK.
3. KPK memiliki kesamaan wewenang dengan *Wilayah al-mazhalim* yang merupakan lembaga khusus pada masa Dinasti Abbasiyah yakni bertugas memberantas kecurangan yang dilakukan pegawai atau pejabat negara yang ditugaskan untuk memelihara dan menggunakan harta kekayaan negara sebagaimana mestinya. Dalam fiqh siyasah, pengalihan status

pegawai KPK menjadi ASN ini dapat dinilai tepat. Karena menaikkan kesejahteraan pegawai untuk menghindari korupsi, tercantum pada hadist riwayat Abdurrahman bin Zubair dan al-Mustaurid bin Syaddad.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran untuk pihak – pihak terkait yakni :

1. Kepada Pemerintah untuk dapat menjaga kepercayaan rakyat dan menegakkan kemaslahatan umat sebagaimana mestinya. Masyarakat membutuhkan pemahaman lebih mengenai peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah, adanya sosialisasi terlebih dahulu akan memberikan masyarakat waktu untuk memahami dan menerima. Kurangnya sosialisasi dan juga keterbukaan pemerintah terhadap jalannya pemerintahan seperti pembuatan peraturan-peraturan baru secara membuat masyarakat sulit memahami dan menerima.
2. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terus tingkatkan kinerja pegawai untuk memberantas koruptor di Indonesia. Jaga dan lindungi pegawai-pegawai KPK dari niat kotor korupsi, karena tidak sepatasnya KPK sebagai pemberantas korupsi melakukannya juga. Pengalihan status pegawai KPK ini memang menjadi polemik, buktikan bahwa itu tidak mempengaruhi integritas KPK.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis hanya meneliti dampak dari pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Jadi penulis

menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan metode yang berbeda tentang bagaimana kinerja pegawai KPK setelah menjadi pegawai ASN.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana)
- Achmad Bajuri, "Jurnal Bisnis dan Ekonomi", *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2011
- Ahmad Rifa'i, Implikasi Kaidah Fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى لِرْعِيَّةِ مَنْوُظٍ بِالْمَصْلَحَةِ* Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Angga Anjaya, "Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)
- Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012)
- Chatrina Darul, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. Kalim : Banten
- Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika: Jakarta)
- Enang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi*, (PT. Remaja Rosda Karya : Bandung, 2016)
- Faizulrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi*, Suska Press : Pekanbaru, 2011
- Haun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/08/09/161438465/pegawai-kpk-kini-resmi-berstatus-asn-pp-sudah-ditandatangani-jokowi>, diakses pada 11/09/2020 pukul 12.10 wib
- <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses pada 11 Maret 2021
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=3> , diakses pada 27/06/2021, pukul 21.08 wib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/06/75-pegawai-kpk-mereka-bukan-sekadar-angka> , diakses pada 27/06/2021, pukul 19.46 wib

Ija Sunana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (2)

Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15

Jinly Asshidique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2016 (Sinar Grafika:Jakarta)

Juair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)

Kelik Iswandi, Nanik P, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia", Volume 26, No. 4

Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Penerbit Andi:Yogyakarta)

Melkisedek Bagas, *Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri*, (Kalimantan Barat: PT.Maraga Borneo, 2013)

Mohd. Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen?", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 12, No. 01 (2021), hal.27

Nimatul Huda, *"Hukum Tata Negara Indonesia"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Nur Rahmat, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*, (Relasi Inti Media: Yogyakarta, 2015)

Reno Mawarini Sukmariningsih, "Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Volume 25, No.2, 2014

Reza Haridsyah Lubis, *"Pengaruh Perbedaan Status Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Panyabungan Utara"*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018)

Romli Atmasasmita, dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi : Fakta dan Analisis*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- SBY, *Strategi Pemberantasan Korupsi Era SBY*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2020)
- Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*,(Sinar Grafika:Jakarta)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta:Bandung)
- Teresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No.2, 2016
- Tenku Saiful Bahri Johan, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),
- Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi : Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*, (Jakarta: PT. Centro Inti Media, 2018)
- Yopa Puspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”, *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*,(Saka Mitra Kompetensi : Klaten)
- Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam (Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh :

Nama : Wiedzianty Septiana Wulandari
 NIM : 11720424952
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Penguji II
Dr. M. Alpi syahrin, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : WIEDZIANITY SEPTIANA WULANDARI

NPM : 11720424952

JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

JUDUL : ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Dr. Arisman., M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Wiedzianty Septiana Wulandari, lahir pada 13 September 1999 di Bengkalis. Penulis merupakan anak dari Bapak Hartosusilo, S.Pd.I dan Ibu Wahyuning Windarwati, S.Pd.I, juga putri sulung dari tiga bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri 022 Desa

Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan pada tahun 2005 dan lulus di tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Siak pada tahun 2011 dan lulus di tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri Siak pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi yakni Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada tanggal 23 Juni 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi **“Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah”** dan dinyatakan lulus dengan prediket Cum Laude serta menyandang gelar Sarjana Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.